

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI TERMINAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI KINERJA PEGAWAI

Asmaria¹, Zesty miranda²

asmariafisip@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar ketertarikan pada adanya permasalahan menyangkut tidak tercapainya target retribusi terminal kota Bandar Lampung setiap tahunnya. Mengungkap dan menganalisis persoalan tersebut menggunakan kajian Pendapatan Daerah, yang dilihat dari Kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah *survey eksplanatori* dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (terdiri dari observasi, wawancara dan kusioner). Penarikan sampel menggunakan Porforsional random sampling selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi berganda binari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tercapainya target retribusi terminal di Bandar Lampung dilihat dari Kinerja Pegawai berada pada kategori positif, hal ini diperkuat oleh hasil perhitungan melalui uji statistik bahwa Kinerja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target retribusi terminal di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukti teoritis dan empiris menunjukkan adanya pengaruh positif dari Kinerja pegawai terhadap pencapaian target retribusi terminal, untuk itu disarankan dalam pengelolaan retribusi terminal harus memperhatikan kinerja pegawai, fasilitas terminal dan pengawasan sehingga akan berimplikasi pada pencapaian target retribusi terminal di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Retibusi terminal, kinerja pegawai

Abstract

This research was conducted based on interest in the problem of not achieving the target for the Bandar Lampung city terminal levy every year. Reveal and analyze this problem using a Regional Income study, which is seen from employee performance. The research method used is an explanatory survey with data collection techniques through literature study and field studies (consisting of observation, interviews and questionnaires). Sampling used proportional random sampling, then the data obtained was analyzed using binary multiple regression. The research results show that the achievement of the terminal levy target in Bandar Lampung seen from employee performance is in the positive category. This is confirmed by the results of calculations through statistical tests that employee performance has a significant effect on achieving the terminal levy target in Bandar Lampung City. Thus, it can be said that theoretical and empirical evidence shows that there is a positive influence of employee performance on achieving terminal levy targets, therefore it is recommended that in managing terminal levies we must pay attention to employee performance, terminal facilities and supervision so that this will have implications for achieving terminal levy targets in Bandar Lampung City.

Keywords: Terminal levies, employee performance

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak terlepas dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, ekonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan kelembagaan dan penguasaan teknologi, kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, efektif dan efisien, kerjasama ekonomi antar kawasan dan daerah untuk mencapai kemajuan, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh tanah air.

Amanat tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah selain berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menuntut kemampuan daerah yang bersangkutan untuk mengelola keuangan daerah secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang didukung oleh semua fungsi manajemen yang terarah serta dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, diharapkan daerah tidak lagi hanya sekedar menunggu subsidi dari pemerintah pusat, agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, maka kepada daerah perlu diberikan sumber sumber keuangan sendiri sebagai mana dijelaskan dalam penjelasan Undang Undang No. 32 Tahun 2000 Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana pembangunan, tetapi hal tersebut harus diimbangi oleh instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberi nuansa manajemen keuangan yang lebih partisipatif. Dengan demikian, makna otonomi daerah ditetapkan dalam kerangka yang benar, yaitu memberi kewenangan daerah untuk mengkoordinasikan, memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan berbagai program pembangunan.

Sebagai tindak lanjut pemberian otonomi daerah tersebut, maka kepada daerah yang bersangkutan dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, termasuk mengatur dan mengurus sumber

keuangannya sendiri. Potensi-potensi daerah tersebut merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang akan digunakan daerah untuk mendukung atau membiayai seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan (Pamudji, 1992)

Sumber-sumber keuangan daerah, berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah, Dana Perimbangan Lain lain Pendapatan Daerah yang syah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada Kota Bandar Lampung saat ini tidak jauh berbeda keuangan daerahnya dengan daerah lainnya, karena pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu menyiapkan keuangan daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan yaitu pembangunan (*development*), pelayanan (*service*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Sumber sumber keuangan Kota Bandar Lampung berasal dari Pajak, Retribusi dan usaha daerah serta lain-lain. Sumber keuangan daerah yang berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah adalah retribusi daerah, retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada PAD kota Bandar Lampung yaitu sebesar 25 % dari total PAD.

Retribusi daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali dan diperluas pengelolanya, karena retribusi daerah dipungut atas dasar jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Kaho, JR (2005) bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial yang dimiliki pemerintah Kota Bandar Lampung adalah retribusi terminal, hal ini beralasan, mengingat letak Kota Bandar Lampung sangat strategis sebagai daerah perdagangan dan daerah persinggahan/transit lintas antar pulau/daerah. Artinya retribusi terminal perlu dikembangkan secara efektif dan efisien dengan demikian kontribusi retribusi terminal akan terus meningkat. Namun pada kenyataannya retribusi terminal yang dikelola oleh UPTD-UPTD terminal yang ada di Kota Bandar Lampung selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan (lihat Tabel 1)

Tabel. 1 Realisasi Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung dari Retribusi Terminal

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	1.200.000.000	1.010.197.000	84,18 %
2	2020	1.124.079.000	1.136.103.500	101,07 %
3	2021	1.398.895.460	1.112.513.000	79,53 %
4	2022	1.507.255.460	850.088.000	56,40 %
5	2023	1.500.000.000	774.934.000	51,66 %

Sumber : Dispenda kota Bandar Lampung

Bila dilihat dari tabel 1 diatas tersebut ternyata dari target yang ditetapkan rata-rata setiap tahunnya retribusi yang diperoleh dari Terminal yang ada di Kota Bandar Lampung tidak pernah mencapai target. Sedangkan pada tahun 2020 retribusi terminal memberikan kontribusi mencapai 101,07 % artinya apabila retribusi terminal dikelola dengan baik maka target retribusi terminal akan tercapai.

Menurut pengamatan penulis terminal yang ada di kota Bandar Lampung sama dengan terminal-terminal yang ada di Indonesia pada umumnya terkesan menyeramkan, tempat berkumpulnya para calo, pencoleng, sehingga banyak para penumpang enggan masuk kedalam terminal. Terminal identik dengan tempat umum yang rawan kejahatan seperti salah satu berita dari majalah Tempo tanggal 16 November 2018 bahwa: Di negeri ini, terminal bus menjadi surga para pencopet, tukang palak, calo, dan penipu. Mereka mengamati setiap orang dan selalu siap menerkam korban yang potensial. Karena itu, Anda harus ekstra hati-hati jika berada di terminal, apalagi kalau belum kenal kawasan terminal tersebut. Demikian pula berita harian Lampost tanggal 10 Januari 2019 terjadi pembiusan penumpang bus yang masuk terminal, dimana barang-barang penumpang bus dikuras habis. Penomena tersebut yang membuat terminal-terminal enggan dimasuki oleh penumpang maupun bus/mobil-mobil angkutan. Sedangkan Sumber pendapatan terminal adalah berasal dari jasa-jasa yang disediakan oleh terminal kepada setiap penumpang atau bus/mobil-mobil angkutan yang masuk kedalam terminal. Adapun komponen retribusi yang dapat dikelola oleh terminal seperti retribusi terminal antara lain (Perda 6 tahun 2000): 1) Penyediaan tempat/sarana sekali ma-suk, 2)

Penyediaan tempat parkir/ parkir khusus di dalam terminal, 3) Penumpang dan pengantar (peron), 4) Pelayanan ruang tunggu VIP, 5) Salar tempat usaha, 6) Salar kebersihan.

Komponen retribusi yang dikelola oleh UPTD Terminal berdasarkan Perda 6 Tahun 2000 cukup banyak, namun kondisi terminal yang kurang kondusif membuat para pengguna jasa terminal tidak mau masuk ke dalam terminal. Disamping itu juga dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dibutuhkan aparat yang mempunyai pengabdian, kejujuran yang tinggi dan juga harus mempunyai kemampuan, keterampilan dan kecakapan sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional, sebagaimana dikemukakan oleh Agus Irianto, (1994:276) bahwa Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat harus tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan administrasi ". Dengan memiliki aparat yang berkualitas dalam pemungutan retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Pentingnya kemampuan aparat dalam menjabarkan materi UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas, tentunya akan menciptakan tertib administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga target dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dapat terlampaui.

Sebagaimana diketahui pemungutan retribusi daerah merupakan proses yang panjang dimulai dari pendataan hingga penyetoran oleh karena itu kemampuan aparat harus selalu ditingkatkan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan terciptanya aparat yang berkualitas, bersih dan profesional tentunya efektivitas pemungutan retribusi daerah dapat tercapai dan seterusnya akan berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah (PAD)

Terminal merupakan komponen penting dalam system pengangkutan baik pengangkutan orang maupun barang, karena terminal merupakan prasarana pengangkutan jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan atau barang, perpindahan intra dan atau antar moda angkutan, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. (Suwardjoko P.Warpani, 2002:71)

Mengingat besarnya fungsi terminal maka terminal harus dikelola langsung oleh Pemerintah daerah terutama keterkaitannya dengan pungutan retribusi. Menurut Kaho (2000) Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang ia berulang kali pula menikmati jasa yang disediakan. Hal ini dipertegas oleh Liliawati, E.M., (1998:95) bahwa retribusi dapat dipungut oleh pemerintah secara berulang-ulang, sehingga pemerintah daerah

dapat mengusahakan retribusi jauh lebih tinggi dari pada jumlah yang telah ditetapkan, artinya retribusi terminal akan mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mencapai target retribusi yang telah ditetapkan maka pemungutan Retribusi Terminal dibutuhkan kinerja aparatur yang tinggi sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai yaitu tercapainya target retribusi yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan kinerja aparatur adalah tingkat kemampuan seorang pegawai dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Menurut T.R.Mitchell (Sedarmayanti, 2000:53), kinerja itu merupakan fungsi abilitas dan motivasi, atau dengan kata lain kinerja dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi yang dimiliki oleh individu. Faktor kemampuan jelas sangat mempengaruhi kinerja pegawai, karena dengan memiliki kemampuan otomatis pelayanan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik sehingga mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan dimilikinya faktor kemampuan tentu belum cukup karena dapat saja mereka mampu tetapi tidak mau melakukannya di karenakan faktor motivasi yang kurang mendukung, karena itu faktor motivasi perlu diperhatikan untuk menggerakkan pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

Kemampuan dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan. Hasil kerja tersebut di pengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pelatihan, sikap, dan kepribadian, sedangkan motivasi dalam penelitian ini diartikan sebagai dorongan terhadap pegawai untuk melaksanakan tugas untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan. Hasil kerja tersebut dipengaruhi oleh insentif, pujian, promosi jabatan dan bonus.

Selanjutnya peningkatan penda-patan asli daerah (PAD), yang penulis artikan sebagai penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah perusahaan milik daerah dan pendapatan lain lain yang syah, yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, namun dalam penelitian ini hanya membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari retribusi terminal.

Pelayanan jasa yang disediakan UPTD terminal berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai jasa pelayanan tersebut maka pengelola terminal berhak menarik retribusi. Besarnya tarif retribusi terminal diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian tersebut diatas

dapat dikatakan apabila pemungut retribusi terminal mempunyai kemampuan kerja yang optimal, dan mempunyai motivasi yang tinggi maka diharapkan target retribusi terminal yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Retribusi terminal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karenanya besar-kecilnya retribusi terminal yang diperoleh akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) karena hasil retribusi yang dikelola oleh terminal akan disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan bermaksud memberikan gambaran secara sistematis dengan jalan meneliti, mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data yang terkait dengan Kinerja Pegawai dalam usaha peningkatan pendapatan retribusi terminal di Kota Bandar Lampung. Dan data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif, objek penelitian ini adalah keseluruhan dari pegawai yang ada di UPTD Terminal se Kota Bandar Lampung. Sedangkan besarnya sampel yang akan diambil dari populasi dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Yamane. Hasil perhitungan diperoleh sampel minimal sebesar 76 orang yang tersebar pada 5 UPTD terminal, data dikumpulkan dengan cara: Observasi, Wawancara, Kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment dan uji T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang Terminal yang mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Dinas di bidang terminal.

Keadaan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan lembaga tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Lemahnya kualitas maupun kwantitas sumber daya manusia organisasi/ lembaga akan mengakibatkan kurang mampunya lembaga tersebut dalam

mealaksanakan program kerja secara optimal sebagaimana diharapkan. Sebaliknya semakin baiknya kualitas dan kuantitas aparatur yang bekerja pada lembaga atau organisasi, akan berperan terhadap peningkatan efektifitas maupun produktivitas lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan program kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal didukung oleh 309 orang. Status kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal di Bandar Lampung masih berstatus Tenaga Suka rela (TKS) yaitu sebanyak 204 orang sedangkan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 86 orang dan pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 19 orang.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dan angket yang penulis sebarakan lalu penulis hitung dengan menggunakan program statistika SPSS V.13 dan analisis dapat penulis kemukakan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kualitas kerja Pemungut retribusi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal berada dalam hubungan yang kuat antara kedua variabel sebesar 0.746 sedangkan besarnya pengaruh indikator kualitas kerja terhadap proses pemungutan sebesar 55.7%, hal ini di sebabkan: a) Pemungut retribusi terminal di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. b) Bobot dan beban kerja yang menjadi tugas dan kewenangan setiap pegawai telah sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Pengaruh kuantitas kerja Pemungut retribusi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal menunjukkan hubungan yang kuat sebesar 0.829 sedangkan besarnya pengaruh indikator kuantitas kerja terhadap proses pemungutan sebesar 68.7%, hal ini disebabkan: a) Pemungut retribusi terminal di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung secara kuantitas telah baik melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. b) Kemampuan Pemungut retribusi dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sangat memadai, sehingga pencapaian tugas akan lebih terencana dan terarah.
3. Ketepatan waktu kerja pemungut retribusi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal mempunyai pengaruh sebesar 0.729 sedangkan besarnya pengaruh indikator ketepatan waktu kerja terhadap proses pemungutan Retribusi Daerah sebesar 53.1%, hal ini disebabkan adanya kesadaran pemungut retribusi terminal untuk datang dan pulang tepat waktu, sehingga sejumlah tugas dan kewenangannya selalu diselesaikan tepat waktu.

4. Inisiatif kerja pemungut retribusi mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal sebesar 0.657, sedangkan besarnya pengaruh indikator inisiatif kerja pegawai terhadap proses pemungutan Retribusi terminal sebesar 43.2%, hal ini disebabkan adanya kemauan yang besar dari pemungut retribusi untuk memahami segala tugas yang harus diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada baik dalam diri maupun sarana dan prasarana yang telah tersedia.

5. Kemampuan pemungut retribusi dilihat pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal sebesar 0.622 sedangkan besarnya pengaruh indikator kemampuan kerja pegawai terhadap proses pemungutan sebesar 38.7%, hal ini disebabkan karena adanya kesadaran yang baik dari pegawai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

6. Komunikasi Pemungut retribusi mempunyai pengaruh sebesar 0.550 terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal sedangkan besarnya pengaruh indikator komunikasi pegawai terhadap proses pemungutan Retribusi terminal sebesar 30.3%, hal ini disebabkan adanya komunikasi yang baik secara formal maupun informal pegawai dalam pelaksanaan tugas sehingga memiliki peran dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk menguji hubungan dan pengaruh variabel bebas (Kinerja Pegawai UPTD Terminal di Kota Bandar Lampung) dengan variabel terikat (Peningkatan pendapatan retribusi terminal), data yang diperoleh dimasukkan dalam tabel kerja untuk menentukan nilai-nilai berikut : $\sum n = 76$, $\sum x = 4953.7$, $\sum x^2 = 457920$, $\sum y = 1214.1$, $\sum Y^2 = 27799.65$ dan $\sum xy = 112602.22$

Untuk langkah selanjutnya, nilai-nilai tersebut diproses dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment sehingga diperoleh nilai r hitung = 0,918. Setelah dikonsultasikan dengan tabel harga kritis dari r moment = 0.266, dengan n = 76 dan tingkat kepercayaan 95 %. Berdasarkan kepada kriteria pengujian diatas maka diperoleh nilai $0.266 < 0.918 > 0.266$, berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima ini berarti "Ada pengaruh yang positif antara kinerja pegawai terhadap peningkatan Pendapatan retribusi terminal di Kota Bandar Lampung."

Kemudian untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau tidak, dapat digunakan Uji t diperoleh angka sebesar 16.692. Hasil tersebut dikonsultasikan pada nilai tabel distribusi t untuk n = 76 (dk = n - 2) dengan tingkat kepercayaan 95 % adalah 1.66. Jadi berdasarkan kriteria pengujian dalam distribusi t ternyata $1.66 \leq 16.692 \geq 1.66$, yang berarti " Bahwa hubungan kedua variabel adalah signifikan atau " Jika Kinerja pegawai

ditingkatkan berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, berinisiatif, peningkatan kemampuan dan komunikasi pegawai maka akan diikuti pula dengan kenaikan pendapatan retribusi terminal di Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh atas hubungan antara kedua variabel, maka digunakan perhitungan analisa determinasi, dengan rumus $r^2 = (r_{xy})^2 \times 100\% = 0.9182 \times 100\% = 84.27\%$

Dengan hasil perhitungan tersebut, maka besarnya pengaruh Kinerja pegawai terhadap peningkatan retribusi terminal di Kota Bandar Lampung adalah sebesar: 84,27% , sedangkan pengaruh sebesar 15,7 % disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar kinerja pegawai yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA:

Pustaka yang berupa Buku:

Abu Bakar, Iskandar, 1999, Menuju Lalulintas dan Angkutan jalan yang tertib, Jakarta, Dirjen Perhubungan.

Anwar PM, A.A., (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung: PT. Rernaja Rosdakarya

Eugenia Liliawati Muljono, 1998, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah. Jakarta, Harvanindo.

Halim Abdul, 2007, Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta: UGM.

Manullang M, 2005, Dasar-Dasar Managemen, Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press.

Mardiasmo, 2004, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Edisi II, Yogyakarta: UGM.

Nogi S. Hessel, Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia. Jakarta.

Riwu Kaho, Josep, (2000), Prosfek Otonomi Daerah di Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali.

Soewarno Hadayaningrat, 1996, Pengantar studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono 2007, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta: Bandung.

Suwarjoko P. Warpani, 2002, Pengelolaan Lalulintas dan angkutan jalan, Bandung ITB.

Tisnasasmita, Sudrajat, 1994, Dasar dasar Kebijakan Keuangan Negara, Jakarta: Bina Aksara

Pustaka yang berupa Dokumen dokumen:

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 08 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2020, Tentang Retribusi Terminal